



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
KESIMPULAN RAPAT KERJA GABUNGAN
KOMISI VIII, DAN KOMISI X DPR RI
DENGAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI AGAMA, MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI NEGARA PEDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2008-2009
SELASA, 3 FEBRUARI 2009

Setelah mempelajari penjelasan lisan dan tertulis serta mendengarkan jawaban Menag, Mendiknas, Mendagri, Meneg PAN, dan Kepala BKN RI atas pertanyaan Anggota Komisi VIII dan Komisi X DPR RI dengan agenda pembahasan (1) penyelesaian pengangkatan guru honorer menjadi CPNS, dan (2) sertifikasi guru pada satuan pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional RI dan Departemen Agama RI, maka dapat disimpulkan:

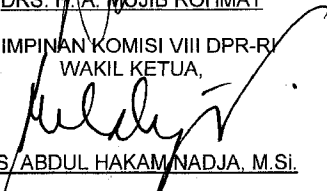
1. Komisi VIII dan Komisi X DPR-RI bersama Pemerintah sepakat agar Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Seleksi Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi CPNS yang antara lain mengakomodasikan keberadaan guru honorer di satuan pendidikan baik di lingkungan Depdiknas RI maupun Depag RI dan mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi CPNS di Lingkungan Depag RI selambat-lambatnya bulan April 2009 sesuai kesepakatan dalam Rapat Kerja Gabungan pada tanggal 7 Juli 2008.
2. Komisi VIII dan Komisi X DPR-RI bersama Pemerintah sepakat agar Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) segera meningkatkan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 yang memerintahkan pengalokasian anggaran pendidikan bagi satuan pendidikan di lingkungan Depag RI dalam APBD sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, khususnya pasal 12 ayat (1). Namun, jika Permendagri belum mengakomodasi ketentuan tersebut, maka disepakati agar Mendagri mengeluarkan Surat Edaran yang memerintahkan pengalokasian anggaran pendidikan bagi satuan pendidikan di lingkungan Depag RI.
3. Komisi VIII dan Komisi X DPR-RI bersama Pemerintah sepakat untuk menyusun pedoman seleksi pengangkatan guru pada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di lingkungan Depdiknas RI dan Depag RI sesuai dengan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan serta peraturan pelaksanaannya.
4. Komisi VIII dan Komisi X DPR-RI bersama Pemerintah sepakat untuk mendorong Pemerintah mempercepat proses sertifikasi dan pembayaran tunjangan profesi bagi guru/dosen swasta maupun negeri dan guru/dosen agama pada satuan pendidikan umum serta membuka akses bagi para guru/dosen secara berkeadilan.
5. Komisi VIII, Komisi X, dan Pemerintah sepakat untuk mendorong Pemerintah untuk melakukan percepatan sertifikasi guru di sekolah maupun madrasah, negeri maupun swasta, dengan perbandingan kuota antara guru PNS dan guru swasta dengan prinsip keadilan proporsional.

6. Komisi VIII dan Komisi X DPR-RI bersama Pemerintah sepakat untuk memprioritaskan pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan honorer lainnya yang telah masuk dalam *database* BKN untuk diangkat menjadi CPNS dalam tahun anggaran 2009. Sedangkan pendidik dan tenaga kependidikan honorer lainnya yang seharusnya bisa masuk *database*, namun belum masuk harus memperoleh prioritas pengangkatan sebagai CPNS dalam Peraturan Pemerintah yang baru sebagaimana dimaksud dalam point 1.
7. Komisi VIII dan Komisi X DPR-RI mendesak Pemerintah untuk melakukan berbagai langkah bagi peningkatan kesejahteraan guru, khususnya guru non-PNS yang mengajar di sekolah dan madrasah swasta dalam bentuk subsidi tunjangan fungsional, agar memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum (KHM) sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

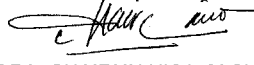
PIMPINAN KOMISI X DPR-RI
WAKIL KETUA,


DRS. H.A. MUJIB ROHMAT


PIMPINAN KOMISI VIII DPR-RI
WAKIL KETUA,


DRS. ABDUL HAKAM NADJA, M.Si.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR-RI
WAKIL KETUA,


DRA. CHAIRUN NISA, M.Si.

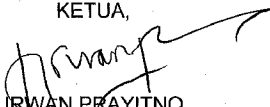
MENTERI AGAMA RI,


M. MAFTUH BASYUNI

BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA RI,


EDY TOPO ASHARI

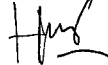
PIMPINAN KOMISI X DPR-RI
KETUA,


IRWAN PRAYITNO

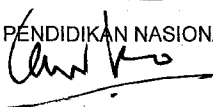
PIMPINAN KOMISI VIII DPR-RI
WAKIL KETUA,


M.H. SAID ABDULLAH

PIMPINAN KOMISI X DPR-RI
WAKIL KETUA,


HERI AKHMADI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI,


PROF. DR. BAMBANG SUDIBYO

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA RI,


TAUFIK EFFENDI

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI,


DIAH ANGGRAENI